

## ABSTRAK

Sistem pemberian tindakan dalam pelayanan kesehatan yang tidak mementingkan keselamatan pasien dapat menyebabkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan berdampak cedera kepada pasien, perpanjangan waktu perawatan serta peningkatan biaya perawatan. Koordinasi antarunit kerja yang terjalin dengan baik dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien. Penelitian ini menggambarkan proses koordinasi antarunit kerja dalam implementasi program Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) di RSUD Haji Surabaya.

Penelitian dilaksanakan di RSUD Haji Surabaya dengan rancangan penelitian deskriptif *cross sectional* terhadap 44 responden yang mewakili unit kerja terkait program KPRS. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden tentang koordinasi, tipe ketergantungan dan mekanisme koordinasi antarunit kerja, proses komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi terkait program KPRS. Pengolahan data dan informasi menghasilkan isu strategis yang digunakan sebagai landasan dalam upaya penyusunan rekomendasi dalam optimalisasi proses koordinasi program KPRS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan koordinasi dalam kategori sedang, tipe ketergantungan antarunit kerja terbanyak adalah tipe *pooled interdependence*, mekanisme koordinasi mayoritas antarunit kerja adalah *standardization*, sedangkan proses komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antarunit kerja sebagian besar tergolong dalam kategori kurang baik, dan identifikasi perbedaan antarunit kerja termasuk dalam kategori relatif sama. Terdapat sejumlah rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil temuan penelitian.

Upaya optimalisasi yang dapat diterapkan dalam implementasi program KPRS di RSUD Haji Surabaya adalah pemetaan tipe ketergantungan dan mekanisme koordinasi antarunit kerja, penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pada setiap program KPRS, pemberian wewenang lebih kepada beberapa petugas *frontliner* untuk mengambil keputusan, penegakan penilaian kinerja dan mekanisme pemberian *reward*, serta penyederhanaan alur koordinasi.

**Kata kunci:** keselamatan pasien, ketergantungan, mekanisme koordinasi